



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
KONSIYERING RDP KOMISI IX DPR RI DENGAN KEPALA BNP2TKI DAN
Plt KEPALA BKKBN DI HOTEL ARYADUTA**

Tahun Sidang	:	2014-2015
Masa Persidangan	:	II
Rapat ke-	:	
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala BNP2TKI dan Plt Kepala BKKBN
Hari, Tanggal	:	RABU, 11 Februari 2015
Waktu	:	10.00 WIB – selesai
Tempat	:	Hotel Aryaduta Tugu Tani, Ball Room B Lobby Level, Jakarta Pusat
Ketua Rapat	:	Dra. Ermalena, MHS/Wk. Ketua Komisi IX DPR RI.
Sekretaris Rapat	:	Muhammad Yus Iqbal, SE/Kabag Set.Kom.IX
Acara	:	Pendalaman Rincian Program dan Kegiatan RAPBN-P Tahun 2015 BNP2TKI dan BKKBN.
Hadir	:	43 Anggota

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI :

1. Dede Yusuf Macan effendi, S.T, M.I.Pol (F-PD)
2. H. Syamsul Bachri, M.Sc (F-PG)
3. Pius Lustrilanang, S.IP, M.Si (F-P.Gerindra)
4. H. Asman Abnur, SE.,M.Si (F-PAN)
5. Dra. Hj. Ermalena, MHS (F-PPP)

F.PDIP :

6. Hj. Elva Hartati, S.IP, MM
7. Ir, Ketut Sustiwawan
8. dr. Ribka Tjiptaning
9. Daniel Lumban Tobing

10. H. Imam Suroso, S.Sos, SH, MM
11. Nursuhud
12. Abidin Fikri, SH

F.PG :

13. Hj. Saniatul Lativa, SE
14. Hj. Dewi Asmara, SH, MH.
15. H.Budi Supriyanto, SH, MH
16. dr. Charles J. Mesang
17. Aditya Anugrah Moha, S.Ked
18. drg. Hj. Andi Fauziah Pujawatie Hatta, SKG

F.P.GERINDRA :

19. Khaidir
20. dr. H. Suir Syam, M. Kes.
21. Susi Syahdonna Bachsin, SE, MM.
22. drg. Putih Sari
23. Roberth Rouw.

F.PD :

24. Drs. H. Zulfikar Achmad
25. Siti Mufattahah, Psi.
26. Drs. Ayub Khan.
27. dr. Verna Gladies Merry Inkiriwang
28. Hj. Aliyah Mustika Ilham, SE.

F.PAN :

29. Ir. H.A. Riski Sadig
30. Dr. H.M. Ali Taher Parasong, SH, M.Hum.
31. Hang Ali Saputra Syah Pahan, SH

F.PKB :

32. H. Handayani, SKM
33. Hj. Nihayatul Wafiroh, MA
34. Dra. Hj. Siti Masrifah, MA

F.PKS :

35. Anshory Siregar, Lc
36. Drs. H. Chairul Anwar, Apt

F.PPP :

37. H. Muhammad Iqbal, SE., M.Com.
38. Dra. Hj. Okky Asokawati, M.Si.
39. Drs. H. Irgan Chairul Mahfiz, M.Si.

F.P.NASDEM :

40. Irma Suryani Chaniago, SE
41. Ir. Ali Mahir, MM
42. Amelia Anggraini.

F.P. HANURA :

43. Capt. Djoni Rolindrawan, SE.,M.MAR, MBA

ANGGOTA IZIN/SAKIT :

UNDANGAN :

1. Nusron Wahid (Kepala BNP2TKI) beserta jajaran
2. Ir. Ambar Rahayu, MNS (Plt Kepala BKKBN) beserta jajaran.

JALANNYA RAPAT :

RAPAT DIBUKA PUKUL 10:00 WIB

KETUA RAPAT (F-PPP/Dra. ERMALENA, MHS) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Kepala BNP2TKI, Kepala BKKBN, BLT, teman-teman dari Komisi IX yang hadir pada hari ini. Hari ini kita akan melaksanakan RDPU dengan dua badan, karena teman-teman Komisi IX masih ada dibawah dan akan segera naik, saya minta persetujuan, kita skor dulu selama 5 menit ya. Baik, skor 5 menit.

(RAPAT DISKORS 5 MENIT)

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

.....(suara terputus)yaitu dukungan pembiayaan pemulangan WNI bermasalah atau TKI bermasalah ini dibagi dua, yang pertama di Kemenlu, Kemenlu yaitu pemulangan dari negara setempat sampai ke port di Indonesia bisa di Seaport, bisa juga Airport di Indonesia itu tempatnya ada di Kemenlu. Kemudian yang dari port Indonesia sampai ke daerahnya masing-masing itu tanggung jawabnya BNP2TKI, kemudian yang nomor 2 yaitu adalah pemberdayaan TKI bermasalah dan TKI purna karena perintahnya Bapak Presiden adalah untuk memulangkan teman-teman kita yang kurang beruntung yang bekerja diluar negeri tapi menghadapi masalah. Kemudian yang nomor 3, adalah dukungan APBN untuk meringankan beban TKI atau calon TKI, nanti akan kami sampaikan.

Ini yang kebetulan waktu APBNP kita usulkan dan kemarin kita juga dapat kabar secara informal bahwa usulan ini belum bisa untuk ditindaklanjuti. Kenapa belum bisa ditindaklanjuti, kenapa kita ajukan ini, pertama, ada kekurangtepatan dalam pola penghitungan atau baseline penghitungan. Pertama yaitu pelayanan penempatan TKI kita atau pelayanan dokumen pelayanan kegiatan dan sebagainya, maaf, baru dihitung pada level 300.000 orang per tahun. Padahal berdasarkan data series yang ada selama tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014 penempatan TKI kita ke luar negeri itu rata-rata 524.000 orang. Baru kita asumsikan dananya 300.000. Tahun 2014 saja sudah banya moratorium itu masih 429.000. Sementara baseline kita masih menghitung dengan angka 300.000. Jadi artinya kecepatan mesin kami di BNP2TKI dikasih bensin untuk 300.000 tapi diminta untuk menampung penumpang sebanyak 524.000. Sehingga antara bensin dengan penumpangnya tidak seimbang. Karena itu pada level ini sebetulnya kita ingin meminta kepada Pemerintah dan persetujuan daripada teman-teman dan Bapak, Ibu sekalian Komisi IX untuk menambah bensin karena penumpang kita yang terlalu banyak atau ada kebijakan lain, bensinnya tetap tetapi kita hanya melayani penumpang

yang 300.000. Sehingga nanti kalau ada penumpang kececer kita jangan disalahkan. Ini adalah masalah kebijakan Pemerintah juga sekaligus kebijakan bersama-sama dengan DPR. Ini masalah negara. Tapi rasanya negara ini lucu, kalau nanti ada penumpang yang terangkut juga ada penumpang yang tercecer. Dialog kita ada anak tiri di Bangsa Indonesia ini sehingga itu juga tidak mungkin kita lakukan.

Yang kedua, adalah dukungan untuk biaya pemulangan. Berdasarkan Rapat Menko PMK dari angka, ini naik lagi menurut data dari Menlu kemarin jumlah TKI kita bermasalah dalam arti yang undocumented di luar negeri yang semula 1.870.146 orang ternyata hasil laporan Menlu kemarin di Rapat Kabinet nambah lagi. Jadi setiap hari begitu ada pengumuman pemulangan, nambah yaitu menjadi 1.926.618 orang. Ini Rapat Kabinet kemarin dan dari sekian banyak itu 99,1% bekerja di domestik workers. 68% wanita. Bisa dibayangkan berarti 99,1% domestic workers, 68% wanita dipastikan mereka dalam kondisi lemah tidak berdaya dan memang betul-betul membutuhkan pertolongan dan membutuhkan kehadiran negara disitu.

Kemarin kita Rapat dengan Menteri Keuangan, dengan Wakil Menteri Keuangan dengan Menteri Tenaga Kerja juga dengan BNP2TKI disaksikan oleh Presiden kita dikasih realokasi dana full, kebendaharaan umum negara yang semua itu masuk cadangan lain-lain di BUN akan di realokasikan sebanyak 1 trilyun untuk 4 komponen dan itu ada di 3 KL. Yang pertama adalah biaya pemulangan dari port negara penempatan ke port Indonesia apakah Airport maupun Seaport sebanyak 50.000 orang tempatnya ada di Kemenlu. 50.000 itu selain itu baseline kita buat asumsi karena apa, karena ada mekanisme pemulangan yang reguler itu melalui model deportasi. Kalau model deportasi itu semua ditanggung oleh negara penempatan. Tetapi yang ini hanya betul-betul yang kondisi membutuhkan. 50.000 kita bagi menjadi 3 rumus, 50% itu Malaysia karena memang kita melihat sebaran peta yang paling banyak dimana, 30% Timur Tengah, 20% lain-lain, ada Hongkong, Taiwan, Belanda, macam-macam itu tetapi plus minus dibolak balik nanti sebarannya adalah 50% Malaysia, 30% Timur Tengah, 20% lain-lain. Itu dengan asumsi angka 50%. Karena ditetapkan angka 50.000 maka biaya pemulangan kita dari port Indonesia ke daerah asalnya juga kita membuat asumsi 50.000. Kita sudah membuat asumsi 50.000 kita bagi lagi menjadi 2, 50.000 itu. 70% Pulau Jawa, karena memang sebaran manusianya sebagian besar TKI di Pulau Jawa kalau tidak Jawa Barat daerahnya Mbak Ning mana Sukabumi tadi ini ya kan kalau tidak Jawa Barat lalu kemudian Jawa Tengah dan hanya Pak Budi ini kemudian Jawa Timur ya daerahnya Pak Jhony juga itu Cianjur kemudian NTB, NTT. Manusiannya ini kebanyakan dari sini. Karena itu kita bagi kemarin 70% Jawa dan 30% luar Jawa. Dengan asumsi range kalau dari Pulau Jawa, antara Pulau Jawa 500.000 satu orang, kalau dari luar Jawa karena naik pesawat meskipun Lion atau Air Asia moga-moga selamat saja karena naik Air Asia itu 1,5 juta per orang maka ketemulah angka ini.

Kemudian mengenai yang kedua adalah karena yang dipulangkan 50.000 orang maka 50.000 orang juga ada pemberdayaan jadi mereka setelah pulang tidak kita biarkan tapi langsung kita tampung di Kabupaten Kota itu kita cluster kemudian kita latih ada pemagangan lagi supaya mereka tidak ada motivasi lagi untuk kembali ke luar negeri dan disana

akan jadi masalah lagi. Sehingga total-total kita butuh dana 225 milyar. Moga-moga di hasilkan. Ini yang kedua. Yang pertama.

Yang kedua, dana realokasi BUN itu, yang kedua ini akan dialokasikan ke Kemenaker untuk apa, untuk "subsidi" atau bantuan atau apa, biaya Balai Latihan Kerja Luar Negeri untuk calon TKI. Kenapa ini dilakukan, Bapak, Ibu sekalian mungkin langsung mohon disampaikan Pak, yang *cost of structure* Pak, lanjut supaya ini yang *cost of structure*, nah ini Bapak, Ibu sekalian, ini komponen biaya kalau TKI ke luar negeri dan komponen beban potongannya. Ini yang menggunakan mekanisme *cost of structure* itu ada 3 negara, pertama, Taiwan, kedua, Hongkong, ketiga Singapura. Komponen paling besar itu adalah pelatihan dengan asumsi 600 jam pelajaran. Seorang TKI untuk bisa berangkat ke luar negeri dia harus mengeluarkan uang 17.040.000 ke Taiwan. Selama disana dia masih menanggung biaya ada fee agency sekitar 22.500 juta untuk 3 tahun, ada medical check up di Taiwan 3 juta, ada Askes 3.700 juta, ada KTP selama disana 1.125 juta ada bunga pinjaman bank kenapa, karena dana-dana yang dikeluarkan oleh PPTKIS kepada TKI ini ternyata di over charge menjadi hutang dan ada split bunga didisitu biasanya cicilan kalau di Hongkong itu 6 bulan, di Singapura 4 bulan kalau di Taiwan 9 bulan. Ini yang membuat si TKI kena beban selama 3 tahun sebanyak 51 juta padahal gajinya hanya 15.840 NT yang kalau kita menggunakan kurs rata-rata 375 itu equivalen dengan Rp 4.780.000 sehingga 11 bulan gajinya hilang. Kami mempunyai rencana usulan sebelah kanannya usulan kami kepada Presiden tapi dan ini hasil tripartid kami dengan PPTKIS juga dengan serikat buruh wakil-wakilnya disini ada beberapa komponen-komponen biaya yang semula ditanggung TKI harus diambil oleh negara sebagai bukti dan komitmen negara hadir disini.

Salah satu komitmen yang harus diambil negara adalah BLK. Karena itu komponen yang ketiga dana realokasi BUN nanti akan digunakan di BLK tapi tempatnya ada di Pak Menteri Tenaga Kerja karena di kami belum mempunyai nomenklatur untuk itu. Karena itu mohon persetujuan Bapak, Ibu sekalian kalau itu mohon segera dibahas karena ini kalau terjadi akan berdampak terhadap revolusi model penempatan tenaga kerja Indonesia yang selama ini tidak pernah tersentuh akan menjadi tersentuh disini. Kalau asumsinya ini semua terpenuhi maka beban TKI dari 51 juta tinggal 19 juta kedepan, kalau terpenuhi. Tapi kalau tidak, meskipun tidak terpenuhi semua hanya separuh misal, sudah lumayan yang penting komitmen kita adalah message pesan, moral kepada rakyat mengurangi beban 51 juta kebawah ini menjadi turun.

Yang keempat, ini kan *off the record* ini tidak ada wartawan kan, mohon maaf tidak ada kan, kemarin Rapat Kabinet realokasi dana BUN itu akan dialokasikan di Kemenlu lagi untuk bayar Biak the lute money karena ada 38, eh ada 229 TKI kita yang terancam hukuman mati. 229. 168 di Malaysia, 72% kasusnya narkoba, 17% kasusnya pembunuhan yang di Arab Saudi ada 38 orang. Dari 38 orang ini yang mendesak akan dieksekusi tahun ini ada 14 salah satunya adalah Karni dari Brebes karena membunuh anak kecil umur 4 tahun dan akibat pembunuhan itu orang tuanya lagi dikantor kemudian pulang panik dan orang tuanya nabrak orang lagi, mati lagi 2 orang berarti seperti itu sehingga diancam hukuman mati si Karni ini sudah hukuman binding tinggal mediasi di Lembaga Afwu

disana dan keluarganya sampai hari ini belum memaafkan. Yang satu lagi yang mendesak bulan depan bahkan mungkin minggu depan tapi mohon jangan diumumkan dulu ini sensitif sekali itu adalah Zaenab dari Bangkalan. Zaenab ini sudah membunuh orang sejak tahun 1999 tapi karena ahli warisnya waktu itu masih kecil maka hukumannya dipending sampai menunggu anaknya itu akil balig dan jatuh akil balignya itu pada tahun 2013. Pemerintah sudah berhasil mempending sampai 2 tahun, hari ini berdasarkan sidang terakhir atau mediasi terakhir dengan Lembaga Afwu atau lembaga pemaafan mereka mau memaafkan keluarganya tapi membuka angka ganti rugi atau diyat atau blut money. Berapa angkanya keluarganya diminta untuk membuka angka kemudian pemerintah Indonesia dalam rangka perlindungan membuka angka maksimal kemampuan kita adalah 200.000 real atau 600 juta. Ketika ngomong 200.000 real diketawain sama Lembaga Afwu-nya dianggap penghinaan malah dengan ngeledak ngomong begini kalau 200.000 real sudah begini saja saya nanti sebagai Ketua Lembaga Afwu yang membantu mereka malah mau dibantu 200.000 real juga. Kemarin Rapat Kabinet sejauhmana batas-batas negara hadir dan ini berapapun kita bayar menimbulkan konsekuensi-konsekuensi. Ada 3 alternatif, alternatif pertama adalah kita mau full membantu support berapapun harganya itu berarti negara hadir penuh tetapi mempunyai konsekuensi-konsekuensi. Pertama, konsekuensi adalah APBN jebol kalau kita gunakan untuk membayar itu semua nanti alat KB BKKBN tidak jadi kebeli, kalau kita penuhi untuk itu.

Konsekuensi yang kedua adalah kita akan selalu dipermainkan "oleh orang Arab" karena kalau kita penuhi semua kan kita masih punya cadangan 38, kalau satu begini nanti akan begitu terus sejauhmana kita akan mempunyai ini. Kemudian yang nomor tiga adalah kita akan moral *hazard* teman-teman kita, halah, membunuh juga tidak apa-apa nanti ujung-ujungnya Pemerintah akan tanggung begitu terus, jadi tidak bagus.

Kemudian opsi kedua, opsi ini tidak dipilih oleh Presiden, opsi kedua adalah opsi riyat minimum dibantu minimum (rekaman terputus), kalau perempuan 200 ribu real, kalau laki-laki 400 ribu real, kalau ini dilakukan jelas-jelas akan nolak malahan mau diledak, dibantu sama hakimnya tadi *mendingan gue yang bayar deh* kata hakimnya begitu. Nah, akhirnya Pemerintah memutuskan jalan tengah yang ketiga, yaitu adalah maksimal 3 kali diyat sari jadi 600 ribu kalau wanita dan 1,2 juta real atau 3,6 miliar berarti kalau laki-laki dan segala konsekuensi di lapangan di Indonesia nanti akan diperintahkan kita untuk menghadapi kepada publik terutama kepada sensitifitas masyarakat yang penting sinyal bahwa batas teknis sudah maksimum, karena kalau ngikutin harga permainan orang Arab ini jelas kita tidak mampu dan perlu diingat tidak ada satu negara pun di dunia ini yang menggunakan dana APBNnya untuk membayar diyat, hanya Indonesia yang menganggarkan itu sehingga kami mohon maaf nanti minta tolong Ibu dan Bapak sekalian yang Anggota DPR RI karena ini bukan hanya menyangkut di BNP2TKI, tidak hanya menyangkut kami di pemerintah tetapi ini menyangkut Bangsa Indonesia, kami dalam menghadapi masalah ancaman hukuman mati ini nanti kita serahkan dan sama-sama punya pandangan yang sama yang penting Negara sudah hadir maksimal, perkara nanti kemudian ada partisipasi publik dari masyarakat, apakah dari Majelis Ulama Indonesia, dari Lasnas atau nanti

Teman-teman biasanya LSM itu di jalan itu donasi krecek-krecek dibawah dijalan begitu tidak kita halangi tetapi yang jelas kita bersama-sama, Negara tetap hadir tetapi batas maksimumnya sekian karena takutnya nanti kalau kita ikutin semua yang lain tidak kebagian tetapi di sisi lain kita tidak menutup ruang partisipasi dari masyarakat. Saya kira itu Bu poin ini.

Saya kira itu Bu cukup terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kepada Kepala BKKBN PLT silakan Ibu Ambar.

Plt. KEPALA BKKBN (Ir. AMBAR RAHAYU., MNS) :

Terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semuanya.

Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI dan seluruh hadirin yang kami muliakan.

Pertama-tama, tentunya kami mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmatNya kita bisa bertemu dalam kondisi sehat wal'afiat. Pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih atas undangan Komisi IX DPR RI untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat sesuai dengan surat yang telah dilayangkan kepada kami dan untuk itu kami mohon ijin untuk bisa menyampaikan laporan sebagai berikut ;

Dalam RDP pada tanggal 28 Januari 2015 Komisi IX DPR RI dalam kesimpulan Rapat telah mendesak Pemerintah dalam hal ini BKKBN untuk melakukan langkah-langkah menindaklanjuti berbagai Peraturan Perundang-undangan dan juga termasuk Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 sehingga yang kami usulkan ini memang sangat berdasar kepada beberapa undang-undang yaitu pada slide berikutnya, Undang-Undang No.52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kemudian Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan juga Peraturan Pemerintah No.87 Tahun 2014 dan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2014 tentang RPJMN 2015-2019 dan juga Perpres No.3 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres No.43 Tahun 2014 tentang RKP Tahun 2015. Tentunya kami juga memperhatikan SE Mendagri yang telah diedarkan pada tanggal 16 Januari tentang penyelenggaraan pemerintahan setelah Undang-Undang No.23 Tahun 2014. Nah, oleh karena itu kami juga mempunyai kewajiban untuk memenuhi beberapa indikator kinerja yang pada slide berikutnya ini bisa kami sampaikan tentunya sangat berkaitan dengan 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan yaitu nawacita yang kelima yaitu

meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia dan pada slide berikutnya tentunya ini juga sudah tertulis didalam RPJM 2015-2019 bahwa BKKBN merupakan salah satu Kementerian Lembaga yang mendukung agenda prioritas nomer 5 yaitu melalui pembangunan kependudukan dan keluarga berencana.

Kemudian, pada slide berikutnya kami ingin melaporkan bahwa suatu program dan kegiatan BKKBN 2015-2019 tentunya dalam rangka menurunkan angka laju pertumbuhan penduduk TFR dan I set R serta meningkatkan CFR dan menurunkan (tidak jelas) maka kami mempunyai program kependudukan dan keluarga berencana yang didalamnya terdiri dari bidang-bidang pengendalian penduduk, kemudian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, kemudian keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga dan advokasi pergerakan dan informasi atau APIN. Nah, tentunya ini didukung oleh tiga program generik yaitu bidang pelatihan dan penelitian pengembangan kemudian sekretariat utama dan ekspektorat utama.

Nah, pada slide berikutnya kami ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa program kerja prioritas BKKBN Tahun 2015 adalah yang pertama, sesuai dengan pelayanan KB di era JKN tentunya kami mempunyai kewajiban untuk memenuhi kebutuhan alat kontrasepsi bagi pasangan subur nasional dan ini sudah tercantum di dalam lampiran Undang-Undang No.23 Tahun 2014 dan juga termasuk didalamnya pemantapan alur distribusi supplycin alocon termasuk untuk peningkatan gudang alocon dan yang kedua adalah penyusunan standarisasi pelayanan KB karena ini merupakan sesuatu yang baru dan kita sedang menghadapi pelayanan KB di era JKN, oleh karena itu standarisasi pelayanan KB ini baik medis maupun teknis perlu disusun untuk beberapa fase secara bertahap dan juga yang ketiga adalah penguatan, pembinaan kesetaraan berKB, yang tetap kami utamakan yaitu KB NKJP.

Kemudian, yang ke empat, kami juga tetap menguatkan pergerakan operasional di lapangan dan kemitraan program kependudukan di seluruh tingkatan wilayah yang tentunya ini merupakan hasil kesepakatan kita pada RDP yang lalu bahwa fokus dari program KB ini hendaknya juga menguatkan operasional di lapangan.

Yang kelima, sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2014 bahwa sertifikasi penyuluh KB di lapangan PLKB dengan standarisasi kompetensi ini akan kami lakukan secara bertahap karena kalau sekaligus tampaknya sangat berat karena petugas di lapangan diperkirakan sekitar 17 ribu. Oleh karena itu, kami mengusulkan fokus dengan melakukan secara bertahap.

Kemudian, yang ke enam, perluasan atau KIE (tidak jelas) dan tetap meningkatkan sosialisasi program KKBPK yang difokuskan perubahan perilaku masyarakat dan yang ke tujuh, penguatan data informasi kependudukan dengan memfokuskan pendataan keluarga yang akan dilakukan pada Tahun 2015 ini dengan 33 Provinsi dan yang ke delapan adalah penguatan kapasitas SDM, baik SDM aparatur, SDM lini lapangan, SDM pelayanan KB era BPJS dan juga SDM mitra kerja lainnya.

Kemudian, kami tetap memfokuskan kepada *new inisiatif* KB kencana di 8 Provinsi, kemudian BKB holistik integratif di 33 Provinsi dan genre di 33 Provinsi dan yang ke sepuluh adalah melakukan penyusunan dan

fasilitasi penyusunan peraturan perundangan yang terkait dengan pengendalian penduduk dan KB termasuk didalamnya menurunkan sampai penyusunan NSPK.

Kemudian, pada slide berikutnya ini adalah target atau indikator kinerja yang sudah tercantum di dalam Renstra BKKBN Tahun 2015-2019 dimana selama 5 tahun ini tentunya kami diharapkan bisa menurunkan yang pertama, adalah presentase laju pertumbuhan penduduk yang pada Tahun 2019 nanti diharapkan bisa turun menjadi 1,21 dan Tahun 2015 adalah 1,38% dan kemudian angka kelahiran total diharapkan bisa kami turunkan dari 2,6 pada tahun 2015 menjadi 2,3 dan Tahun 2019 nanti bisa diturunkan menjadi 2,2. Nah, tentunya ini membutuhkan peningkatan CFR, pemakaian kontrasepsi, kemudian juga membutuhkan penurunan kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi, perlu upaya-upaya untuk menurunkan angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun dan juga menurunkan presentase kehamilan yang tidak diinginkan pada wanita subur 15-49 tahun, ini beberapa sasaran yang perlu kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian sebagai sasaran yang tercantum di dalam RPJMN dan juga Renstra BKKBN.

Pada slide berikutnya, kami juga ingin menyampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian ini indikator kinerja yang sudah diturunkan lebih detail lagi baik untuk peserta KB barunya kemudian peserta KB aktifnya, kemudian juga peserta KB aktif EKJB dan juga penurunan angka putus pakai atau drop out dan juga upaya-upaya untuk menurunkan presentase remaja perempuan 15-19 tahun yang menjadi ibu atau sedang hamil anak pertama pada usia yang masih sangat dini dan juga yang ke enam, tentunya meningkatkan pengetahuan pasangan usia subur dan juga meningkatkan semua jenis kontrasepsi modern.

Kemudian, pada slide berikutnya, oleh karena itu pada Tahun 2015 dan ini sudah disetujui pada RDP yang lalu bahwa alokasi anggaran BKKBN adalah sebesar 3,2 yang terbagi untuk program teknis, program generik untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya sebanyak 1,8 kemudian pengawasan sebanyak Rp.5 miliar kemudian, program pelatihan pengembangan Rp.54 miliar dan juga program kependudukan KB sebanyak, ini yang program teknis sebanyak Rp.3 triliun, sehingga jumlah semuanya Rp.3,2 triliun.

Kemudian, pada slide berikutnya, dengan memperhatikan beberapa fokus prioritas kegiatan yang sudah kami sampaikan sebelumnya kami sebenarnya sudah mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk penambahan anggaran, yang pertama, untuk penyusunan regulasi tindak lanjut Undang-Undang No.23 dan PP No.87 dan tentunya merupakan turunan undang-undang No.52 dan ini sebetulnya sudah belum kami usulkan karena ini mengakomodasi hasil RDP yang lalu.

Kemudian, ini adalah gambaran usulan tambahan kami, jadi pada DIPA Tahun 2015 untuk penyusunan peraturan berbagai perundangan ini sebesar 8 miliar kemudian kami usulkan 6,8 miliar dan sesungguhnya kebutuhannya menjadi Rp.15,3 miliar. Kemudian, pada slide berikutnya yang kedua, ini mungkin yang sangat penting sekali karena menyangkut kerja sama BKKBN dengan mitra kerja dimana pembinaan kependudukan KB dan pembangunan keluarga bagi mitra kerja setiap tingkatan wilayah ini juga kami usulkan melalui surat Sestama pada tanggal 3 Desember dan

kemudian ada jawaban dari Menteri Keuangan tentang penyiapan kebutuhan belanja prioritas yang kami terima pada tanggal 1 Desember, jadi usulan tanggal 3 Desember ini mengakomodasi surat Menteri Keuangan. Kemudian, ini yang kami usulkan yang berkaitan dengan pembinaan program KKB bagi mitra yaitu fasilitasi penyuluhan KKBPB bagi PLKB, bagi kader, bagi PPKBD ditingkat desa sehingga yang tadinya memang frekuensinya hanya 3 kali dalam 1 tahun, kami usulkan menjadi 6 kali dalam 1 tahun dengan unit cost per provinsi berkisar 250 juta sampai dengan 150 juta per desa tergantung dari tingkat kesulitan masing-masing daerah.

Kemudian, disamping itu pada slide berikutnya kami juga mengusulkan pembinaan mekanisme pelayanan dasar masyarakat yang ini juga sudah kami usulkan pada tanggal 3 Desember dan usulannya berupa yaitu pembinaan kemitraan KKBPB tingkat desa dengan pengalihan jumlah desa sebanyak 81.243 desa dan alokasi yang semula memang 3 kali frekuensinya, kemudian kami usulkan ada tambahan 3 frekuensi menjadi 6 frekuensinya unit cost antara 200 ribu sampai 300 ribu per desa. Kemudian, pemenuhan standarisasi pelayanan KB di fasilitas kesehatan faskes sebagian dialihkan pada pengembangan kualitas program genre karena genre ini merupakan program yang sangat penting dan pada RDP yang lalu juga banyak dari Anggota Komisi IX DPR RI menyarankan kepada kami untuk fokus kepada genre sehingga yang tadinya kami usulkan untuk standarisasi ini sebagian kami coba untuk mengusulkan untuk genre. Nah, ini yang kami usulkan untuk standarisasi pelayanan KB di tingkat kesehatan, karena saat ini memang di era JKN ini pelayanan KB perlu dilakukan upaya-upaya untuk standarisasi. Jadi, semula pada tanggal 3 Desember kami usulkan sebanyak 66 miliar namun kami kurangi 15 miliar, sesungguhnya untuk kegiatan genre ceria melalui seni budaya dan juga seni budaya tradisional remaja.

Kemudian, dari usulan-usulan yang sudah kami sebutkan akhirnya sesungguhnya BKKBN ini membutuhkan tambahan anggaran sebanyak Rp.202.726.250.000,- (*Dua Ratus Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*), namun kemarin kami mendapat kabar dari Kementerian Keuangan ternyata usulan kami tidak dapat dipenuhi, karena itu melalui Rapat Dengar Pendapat ini mohon kiranya Bapak, Ibu Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI untuk bisa tetap memberikan dorongan agar kebutuhan kami ini bisa dicukupi dan seandainya tidak bisa pada Tahun 2015 paling tidak 2016 bisa kami lakukan.

Kemudian, dari alokasi ini pada slide berikutnya adalah kalau ternyata disetujui seperti inilah sebenarnya pembagian atau pun alokasi pagu anggaran per program dan akhirnya demikian yang bisa kami sampaikan dan besar harapan kami melalui Rapat Dengar Pendapat ini, mudah-mudahan kami mendapatkan dukungan dan persetujuan Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI dan kami juga sangat berharap bahwa program KKBPB di kemudian hari akan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa terutama untuk mewujudkan pembangunan yang berkaitan dengan pembangunan manusia yang tentunya sangat berkaitan dengan nawacita.

Sekian, atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Baik,

Bapak, Ibu yang kami hormati, Anggota Komisi IX DPR RI.

Kita sama-sama sudah mendengarkan dua kepala badan menyampaikan penjelasan kepada kita dan sekarang sampailah kita untuk menyampaikan pendalaman. Saya persilakan kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari Komisi IX DPR RI yang akan menanggapi silakan.

Silakan Pak Ketut.

F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN) :

Ya terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati.
Pak Kepala BNP2TKI, Kepala BKKBN beserta jajaran yang saya hormati.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Selamat pagi.
Salam sejahtera untuk kita semua.**

Saya Ketut Sustiawan dari Fraksi PDI Perjuangan, Dapil Jabar 1 kota Bandung, kota Cimahi.

Yang pertama, saya langsung saja pada materi hari ini pembahasan APBNP terkait dengan dua badan ini, yang pertama untuk BNP2TKI tadi paparannya cukup baik, saya apresiasi untuk paparan yang sangat jelas tadi terkait dengan anggaran untuk pemberdayaan TKI pasca pemulangan, saya kira memang ini hal yang menindaklanjuti RDP kita selanjutnya tentu ini perlu lebih diintensifkan karena ini dukungan pemulangan saya kira solusi pemenuhan pembiayaan ini saya kira menjadi bagian yang penting untuk kita sikapi bagi kita di Komisi IX DPR RI tentu (rekaman terputus) Jawa Barat walaupun saya kota Bandung, kota Cimahi tetapi persoalannya di sekitar Cimahi, mulai dari Indramayu, Cianjur, Sukabumi saya kira ini kontribusi paling besar untuk pengiriman TKI ini dan persoalan pasti cukup banyak, jadi andaikata ini bisa dipenuhi saya kira cukup baik dan bahkan ini adalah sebuah *start* awal bagaimana nanti mensinergikan dengan kegiatan atau anggaran di Kementerian Tenaga Kerja, itu saya kira ini perlu kita dukung bersama ini.

Nah, yang kedua, terkait dengan permasalahan TKI kita diluar, jadi kalau tadi atau ini sudah merupakan keputusan Pemerintah begitu untuk menanggulangi atau membayar Diyat yang 3 kali dari Diyat minimal kalau di Arab Saudi, kalau di tempat lain seperti apa begitu, jadi saya kira ini juga perlu menjadi perhatian kita, ini hal yang sangat sensitif terkait dengan persoalan-persoalan TKI kita diluar negeri, tadi disebutkan 229 TKI terancam hukuman mati, saya kira ini luar biasa jumlah di Arab Saudi saja 38 orang jadi saya kira kalau ini kita penuh ya kalau di Arab Saudi, mungkin ada cara lain yang belum dilakukan atau belum maksimal dilakukan Pemerintah, mungkin kalau jaman Gus Dur bisa dilakukan tetapi sekarang tidak tahu, yang penting tinggal kemauan Presiden kita dengan raja Arab Saudi. Jadi, saya kira ini perlu yang dilakukan bukan hanya sekedar membayar di lembaga petahapan seperti itu, saya kira hal-hal yang hubungan diplomasi dan kalau bahasanya Pak Ali Tahernya ini apa *kiss nya* itu jadi saya meminjam istilahnya s yang terakhir itu silaturahminya, jadi saya kira itu baik untuk kita lakukan. Itu untuk Pak Nusron ya.

Yang kedua, untuk BKKBN, satu hal saja Ibu tadi kalau usulan tambahan anggarannya ini kegiatannya sangat baik saya kira dan ini perlu dukungan kita, saya tidak tahu posisi di Badan Anggaran ini apakah sudah menyelesaikan pembahasan anggaran, tetapi saya kira perlu jadi catatan kita melalui Pimpinan, Teman-teman di Badan Anggaran karena tadi kalau tugas utama dari BKKN antara lain untuk menekan laju kelahiran, angka kematian saya kira dari *road map*nya ini hanya perencanaannya itu tidak begitu ekstrem perubahannya, ya datar-datar saja, jadi saya kira ini mungkin karena program keluarga berencana sudah begitu lama dilupakan dan tidak terdengar seperti Tahun 1980an lagi dan saya ingin satu hal pertanyaan bagaimana *sharring* daerah terhadap anggaran ini karena kita tahu ada juga dinas kependudukan apa macam-macam istilahnya, dinas kependudukan dan keluarga berencana, ada dinas kependudukan dan keluarga sejahtera, tetapi intinya barangkali perlu kita *share* anggaran ini disamping tambahan anggaran tadi untuk Kanwil masih ada BKKBN tetapi sudah tidak sampai kabupaten kota barangkali sehingga ini menjadi tentu bagaimana melaksanakan pondasi ini, tetapi lebih dikaitkan dengan upaya "penarikan kembali" tenaga PLKB menjadi tanggung jawab pusat, nah ini tentu butuh anggaran yang juga tidak kecil begitu. Jadi, saya kira keinginan kita, niat kita saya ingin ingatkan di RDP yang lalu bahwa PLKB ini menjadi tanggung jawab pusat dan hari ini dan beberapa hari yang lalu juga banyak pertanyaan dari PLKB, dari setiap daerah untuk menanyakan tindak lanjut dari keputusan pemerintah untuk menarik atau kewenangan ini menjadi bagian dari pemerintah pusat, saya kira ini juga anggaran seperti ini perlu diperhatikan ke depan, kalau hari ini data yang disampaikan sekitar 17 ribu, sesungguhnya kita perlu PLKB kalau program KB ini berjalan dengan baik, kalau tadi 82 ribu desa kurang lebih ya setidaknya-tidaknya Tahun 2019 41 ribu PLKB perlu diciptakan.

Saya kira itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih.
Selanjutnya dari Pak Djoni Hanura silakan.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR.,MBA) :

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Rekan Anggota Komisi IX DPR RI,
Kepala BNP2TKI yang saya hormati dan Ibu Plt Kepala BKKBN.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang pertama, untuk Kepala BNP2TKI, saya sangat mengapresiasi ke Pak Nusron sehubungan dengan kasus Saudara Ella yang begitu cepat ditanggapi dalam waktu kurang dari 24 jam saya sudah mendapatkan respon walaupun mungkin sedang dalam proses pencarian dan pemulangan TKI atau BMI Ella di Riyat Saudi Arabia. Kemudian, saya ingin menyoroti dari segi perlindungan karena memang di dapil saya itu juga pengekspor BMI yang cukup besar, BNP2TKI mengurus penempatan dan perlindungan, padahal perlindungan Tenaga Kerja kita itu ada juga pos anggarannya di Kementerian Tenaga Kerja dan juga di Kementerian Luar Negeri. Nah, itu saya mohon kepada Pimpinan bagaimana kalau perlindungan ini khususnya yang TKI migran itu berada di BNP2TKI, mungkin nanti Pak Nusron bisa menjelaskan kendala-kendalanya kalau seluruhnya ditempatkan disini atau sebagian besarlah di BNP2TKI supaya satu pintu ya, jadi tidak misalnya sekarang ada 3 Kementerian Lembaga yang mungkin ada memerlukan waktu yang lebih panjang, jadi misalnya kalau ditangani oleh satu lembaga mungkin bisa lebih cepat, itu dari saya untuk BNP2TKI.

Kemudian, BKKBN Plt Bu ya? Gimana?

Plt. KEPALA BKKBN/SESTAMA BKKBN :

Jadi, Sestama merangkap Plt sampai nanti ada Kepala definitif Pak.

F-HANURA (Capt. DJONI ROLINDRAWAN, SE., M.MAR.,MBA) :

Saya tidak tahu lagi mimpi atau apa dibidang Kepala BKKBN laki atau perempuan begitu, terus saya menjawab sendiri begitu ya kayaknya sama saja begitu, saya tidak tahu apa ada perbedaannya karena ada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu kan memang yang dilindungi itu kaum wanita, itu pantas kaum wanita tetapi kalau bicara alat kontrasepsi itu lebih ke perempuan begitu ya? Jadi, itu hanya sekedar ini sajalah, apa namanya inspirasi yang lewat begitu.

Kami mengapresiasi kepada inisiatif dari BKKBN yang hari ini mengumpulkan para TA-TA kami ini ya untuk mendapatkan pengarahan

nanti bagaimana kemitraan antara BKKBN dengan DPR RI begitu ya khususnya yang ada di Komisi IX DPR RI ini, jadi mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti dengan baik, nanti semua 4 program kalau tidak salah yang dulu ditawarkan itu bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Itu saja yang saya sampaikan.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Silakan Pak Handayani.

F-PKB (H. HANDAYANI, SKM) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rekan-rekan Anggota DPR RI Komisi IX, Kepala BNP2TKI dan Kepala BKKBN beserta jajarannya.

Pada prinsipnya karena kedua badan ini tidak ada anggaran tambahan, kami dari Fraksi PKB menyetujui untuk anggaran ini. Selanjutnya, ada sedikit yang akan saya sampaikan untuk penambahan anggaran atau anggaran yang kita semua ini itu kan ditentukan pagu segala macam itu kan di keuangan pemerintahan, mungkin yang akan datang perlunya ada suatu strategi, ada kepiawaian kita untuk meningkatkan anggaran ini, mungkin Rekan-rekan di Badan Anggaran seandainya ada tambahan mungkin waktunya tidak ada lagi sekarang Bapak dan Ibu, jadi kepiawaian yang akan datang bagaimana kita untuk mendapatkan anggaran yang menurut itu anggaran yang dibutuhkan.

Mungkin demikian Pimpinan dan sekali lagi kami sampaikan dari Fraksi PKB setuju untuk anggaran kedua anggaran ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Baik, Pak Handayani.

Selanjutnya, dari depan masih ada atau dari belakang Bu Irma silakan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Bismilahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Pimpinan di Komisi IX DPR RI, Kawan-kawan di Komisi IX DPR RI.

Yang terhormat Kepala BNP2TKI kemudian, Kepala BKKBN dan jajarannya.

Untuk BNP2TKI memang pemulangan tenaga kerja diluar negeri itu menjadi target, namun biayanya kan tidak memadai karena ada tumpang tindih antara BNP2TKI dengan Dinapenta, ini yang dari kemarin saya selalu sampaikan kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk bisa didudukkan siapa sih sebenarnya yang bisa melakukan pemulangan itu, mana yang fungsional dan mana yang struktural istilahnya seperti itu, tetapi sampai hari ini saya belum mendapat kepastian dari Departemen Tenaga Kerja tentang masalah posisi itu. Kemudian, tadi Kepala BNP2TKI menyatakan bahwa ada dana relokasi dari BUN, nah saya hanya ingin Kawan-kawan semua disini untuk ikut mengawal untuk bisa membantu bahwa dana BUN itu juga harus betul-betul bisa dimanfaatkan dan bisa didapatkan oleh BNP2TKI untuk mengawal pemulangan tenaga-tenaga kerja kita, kenapa? Karena Tenaga-tenaga kerja informal ini kan harus dikurangi dan kemudian kita mencoba menaikkan tenaga-tenaga kerja yang formal, nah perlu dukungan yang cukup, masif dan kuat dari Komisi IX DPR RI untuk bisa mensupport Kepala BNP2TKI untuk melakukan ini.

Kemudian, untuk BKKBN sama saya melihat program prioritas BKKBN ini kan meningkatkan kualitas hidup manusia dengan tiga program yaitu menurunkan angka kelahiran, menurunkan laju pertumbuhan penduduk, menurunkan tingkat kelahiran remaja, yang implikasinya tentunya menurunkan angka kemiskinan, memperbaiki kesejahteraan, mengurangi beban pemerintah terhadap subsidi-subsidi, nah terkait masalah ini tentunya banyak sekali sosialisasi yang harus dilakukan oleh BKKBN kepada masyarakat kemudian harus ada *update* data atau penguatan data yang memang harus dimiliki oleh BKKBN sehingga distribusi dan sosialisasinya tepat sasaran, kemudian juga harus dilakukan penguatan kapasitas SDMnya untuk penyuluh-penyuluh di Daerah-daerah, karena saat ini KB itu tidak lagi menjadi kewajiban sehingga banyak sekali laju pertumbuhan penduduk kita tidak terkendali Ibu-ibu. Kemudian, pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi itu juga penting dijaga, dikontrol kemudian juga ketersediaannya untuk bisa disiapkan oleh pemerintah agar tidak sampai terjadi stoknya kurang atau tempatnya tidak ada sehingga distribusi ke daerah-daerah itu tidak terganggu. Nah, untuk ini memang mungkin Komisi IX DPR RI perlu memberikan dukungan kepada BKKBN untuk bisa mendapatkan tambahan anggaran sehingga program-program yang dilakukan oleh BKKBN ini bisa maksimal dan kita juga bisa bekerja sama dari BKKBN untuk bisa membantu pemerintah sesuai dengan nawacita yang diprogramkan oleh Presiden.

Nah, Pak Nusron, saya berkomitmen sekali untuk bisa mengawal dana BUN agar bisa BNP2TKI menggunakannya secara maksimal karena ini sangat penting bagi TKI-TKI kita di luar negeri yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Saya kira itu saja Ketua.

Terima kasih.

*Wabilahi Taufik Wal Hidayah,
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ada lagi silakan?

F-PD (SITI MUFATTAHAH, Psi) :

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI,
Yang saya hormati Bapak Kepala BNP2TKI dan Kepala BKKBN.**

Apresiasi dulu kepada Kepala BNP2TKI meskipun untuk penambahan anggaran tidak ada disini karena memang mungkin hasil rapat tidak mendapatkan tambahan anggaran, tetapi saya mengapresiasi segala hal yang dilakukan oleh BNP2TKI dibawah kepemimpinan Bapak Nusron, kenapa saya mengapresiasi? Karena dari penjelasan Beliau saya suka sekali kalau ada orang yang menjelaskan sesuatu masalah itu dalam beberapa alternatif pilihan begitu ya, pilihan solusi, nah banyak pilihan. Jadi, artinya kalau tidak bisa A, ada pilihan B, C dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kami cukup tenang dan mungkin mempercayakan solusi terhadap permasalahan BNP2TKI ini kepada BNP2TKI dan jajarannya saat ini. Kalau dulu tidak begini Pak Nusron, sangat berbeda sekali saya lihat kepemimpinannya sangat luar biasa, tepuk tangan dulu dong buat Pak Nusron kader Golkar.

Selanjutnya, mungkin yang ingin saya sampaikan bahwa dengan anggaran yang ada sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya bahwa yang ingin saya soroti dan tekankan disini kami mohon untuk kantong-kantong daerah TKI terutama di Dapil saya yaitu Garut dan Tasik Pak Nusron juga jangan lupa Pak Agustin ya Garut dengan Tasik ini kami mohon bersinergi dengan Anggota Dewan karena jangan sampai seperti dulu kami hanya mendengar isunya saja bahwa BNP2TKI hadir di daerah kami tetapi kami tidak dilibatkan atau tidak diundang, minimal tidak diundang saja tidak ada, mendengar beritanya dari konsituen setelah 1 bulan pelaksanaan sehingga kami cukup tersentak dengan berita begitu, mudah-mudahan berikutnya tidak seperti itu, karena kami berharap sinergitas itu ada karena Pak Nusron sebagai Kepala BNP2TKI dan pernah menjadi Anggota Dewan juga paham mengenai hal ini. Saya mohon ini diperhatikan lebih jauh terutama di Garut ini pernah konsituen menanyakan ada beberapa program entah itu masih ada atau tidak, anggarannya juga masih ada atau tidak saya ingin klarifikasi ada program katanya bantuan kepada Kelompok-kelompok perempuan begitu, modal usaha kalau tidak salah tetapi sampai saat ini hanya sekedar isu saja dan itu yang memberikan adalah BP3TKI katanya tetapi itu anggaran pusat, nah ini kan semuanya masih katanya-katanya, makanya kalau misalnya dalam rapat ini diberikan kesempatan untuk mendapatkan penjelasan tentang program-program yang memang menjadi andalan dari BNP2TKI ini akan menjadi satu masukkan yang luar biasa bagi kami sehingga kami bisa menyalurkannya kepada masyarakat yang mungkin insyAllah tepat

sasaran begitu, karena kami memahami daerah pemilihan kami, insyAllah demikian, itu yang kedua.

Kemudian, yang ketiga, kaitannya pemulangan TKI kami berharap memang anggaran jangan, ya mungkin disini ini ya anggaran lebih banyak di alokasikan pada pemulangan-pemulangan TKI tetapi kami berharap juga pemulangan TKI tidak hanya anggaran itu dialokasikan sebesar-besarnya untuk itu tetapi untuk pemberdayaan daerah-daerah atau purna TKI atau pun daerah-daerah yang menjadi kantong TKI itu juga bisa dioptimalkan begitu BNP2TKI mudah-mudahan dengan anggaran yang seminimal ini bisa optimal untuk menangani masalah TKI baik yang diluar negeri maupun didalam negeri sebagai purna TKI, mungkin itu yang ingin saya sampaikan untuk BNP2TKI.

Yang berikutnya, adalah untuk BKKBN untuk Ibu Ambar, mudah-mudahan Ibu Ambar diangkat menjadi Kepala BKKBN karena baru kali ini BKKBN dipimpin oleh perempuan kalau memang Ibu diangkat, mudah-mudahan kalau dipimpin oleh perempuan kebutuhan perempuan juga dipahami semaksimal mungkin, masuk surga katanya Pak Budi begitu.

Selanjutnya Kepala BKKBN dan jajarannya mungkin dari anggaran juga tidak ada penambahan Bu ya? Tetapi program-program yang ingin saya tekankan disini mungkin yang kaitannya program KEI dan Genre tetapi kami mohon Bu untuk KEI dan Genre disesuaikan daerahnya masing-masing, jangan disamaratakan programnya untuk metodenya sosialisasinya jangan disamaratakan, mungkin bisa berkordinasi dengan Anggota Dewan yang bersangkutan karena di masing-masing daerah itu memiliki kekhasan tersendiri, walaupun misalnya kaitan dengan kesenian belum tentu kesenian itu menjadi metode yang lebih tepat untuk mensosialisasikan masalah KB ini, jadi kalau Ibu tadi sampaikan bahwa Genre lebih kearifan lokal kesenian itu juga bisa, mungkin tetapi kalau di daerah kami Ibu, di daerah Garut dengan Tasik selama ini kerja sama kita sudah berjalan dengan baik *alhamdulillah* terima kasih tetapi untuk kesenian mungkin sesekali boleh begitu ya tetapi mereka masih lebih membutuhkan bagaimana pemberian materi secara ceramah begitu, itu lebih pas, mereka diundang tetapi memang yang diundang bukan masyarakat umumnya tetapi yang diundang itu orang-orang kunci di daerah-daerah itu karena mereka nanti diharapkan menjadi duta-duta KB didaerahnya dan kemudian menyebarkan masalah materi yang mereka dapatkan dalam sosialisasi itu. Jadi, kalau ditempat saya mungkin metode ceramah lebih ini, saya pernah protes juga pada saat saya bekerja sama dengan BKKBN dan saya bentuknya bentuknya bentuk ceramah karena memang dari masyarakat menginginkan seperti itu dan saya undang-undang isteri-isteri kepala desa, isteri-isteri RW, RT begitu ya saya undang mereka dan itu sudah sangat mengena bagi mereka, tetapi BKKBN menilai bahwa itu *ah kok seperti begini pelaksanaannya*, padahal itulah yang lebih tepat di daerah saya dibandingkan hanya kesenian biasa, kalau kesenian biasa mereka hanya menangkap *oh iya ada program KB*, semua pasti mendengar istilah tentang KB tetapi apa saja poin-poin yang ada disitu, materi yang ada disitu belum tersampaikan dengan bentuknya kesenian itu. Makanya kami berharap kordinasi kemudian mungkin pelaksanaannya diserahkan pada Anggota Dewan sehingga kami lebih leluasa untuk

melaksanakan sosialisasi KB ini semaksimal mungkin untuk membantu BKKBN dalam mencapai targetnya.

Mungkin itu Ibu yang ingin saya sampaikan tentang sinergitas yang kami harapkan antara BKKBN dengan DPR RI ini yang undangan terhadap TA kami bisa lebih memperjelas sinergitas dari kita.

Terima kasih Pimpinan dan terima kasih atas perhatian semuanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Ada Pak Ansory, ada Pak Imam, Pak Ansory dulu silakan.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Terima kasih Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Saya Ansory Siregar dari Fraksi PKS, Dapil Sumatera Utara III. Langsung saja *to the point*, bahwa memang disini kita tidak menyetujui anggaran memang sudah disetujui anggarannya dan juga tidak ada (tidak jelas), disini kita cuman evaluasi sebenarnya. Jadi, langsung saja untuk semua sebenarnya untuk dua tamu kita ini, lebih khusus memang untuk BKKBN bahwa titik ya, titik-titik sosialisasi itu harus Anggota yang menentukan dimana tempatnya sesuai dengan yang sebelumnya juga kita juga yang menentukan, disamping kita yang menentukan titik dan dimana tempatnya itu, waktunya juga kita yang menentukan, bukan Bapak yang menentukan, tetapi waktu Dewan mana yang kosong karena mengingat waktu bapak lihat sendiri waktu kami di DPR RI sebagai Anggota begitu ya, kecuali kalau tidak Anggota mungkin bisa 24 jam begitu ya tetapi karena kita ini penuh dengan Rapat-rapat ya mungkin kadang juga keluar, jadi waktunya itu juga mengikuti Anggota Dewan, itu yang pertama.

Yang kedua, pada waktu Tahun 2013 itu kita sudah mendapatkan satu per Anggota dalam arti 1 miliar per Anggota untuk sosialisasi dimana waktu itu satu titik 200 juta, 150-200 begitu dan itu bisa bayangkan 50 baru 50 miliar dari anggaran Ibu, jadi jangan Bapak lihat itu sudah banyak 1 miliar tidak, kadang-kadang itu pun sosialisasi itu kita yang habis duit, tidak ada masuk ke kantong-kantong pribadi, malahan kita abis duit ongkos, abis ini dan itu, menyiapkan disana juga masih kurang kadang-kadang begitu walaupun kita kasih mereka itu uang makan, uang transport atau juga uang saku begitu ya, kalau tidak salah waktu itu kan antara 75-100 ribu per orang, nah ini saya dengar kemarin itu kurang, kita ke depan kan maunya naik, saya dengar kemarin ada masukkan katanya 15 kegiatan, per kegiatan 50 juta itu kan berarti 7,5 Bu, kalau 50 kegiatan itu berarti harus 25 kegiatan per Anggota, berat saya untuk kita mengevaluasi hadir seperti ini kalau hanya kita tinggal dan itu pun 1,5 cuman 75 seluruh Anggota komisi ini, anggaran Ibu yang dari ini apa namanya tidak mungkinlah kita mendukung terus juga kita tidak mengotak-atiklah, setuju kita semuanya ini tetapi tolong juga istilahnya kita itulah jerih payah kita

kepada Dapil, kepada konsituen kita untuk bertemu dengan mereka, kalau uang-uang kami habis juga untuk itu ya Rapat-rapat kita seperti ini juga ya harus ada nampaknya di antara kita. Jadi, saya mohon itu 25 titik, kalau itu 50 per titik ya berarti kalau seumpamanya 200 per titik seperti yang lalu itu berarti paling tidak 7 atau 8 dinaikkanlah jangan diturunkan.

Begitu juga mungkin untuk BNP2TKI selamat siang Pak Nusron kawan lama dan jajarannya semuanya kita disini itu juga Pak sosialisasi itu Pak sama dengan yang tadi, kita yang menentukan kemudian kalau umpamanya EO nya terserahlah kita di lapangan siapa, yang penting itu istilahnya acara tersebut jadi. Kalau kemarin itu begitu langsung saya di telepon sama BNP2TKI *acaranya tanggal sekian, jam sekian begitu*, terpaksa batal karena saya tidak bisa dan paling tidak kalau tidak salah kan di sosialisasi disini lebih banyak kalau tidak salah antara 500 sampai 750 juta bagus sebenarnya seperti itu, kalau tidak salah BKKBN perlu meniru seperti ini, kenapa? Kalau sosialisasi cuman 50 juta, tidak ada artinya maka nanti yang Ibu Plt yang 50 juta nanti mau kita gabung itu 5 kegiatan, kalau satu kegiatan percuma tidak usah, hanya mengumpulkan 2-3 orang, beberapa orang begitu, kita harus kumpulin 500 sampai 1000 orang biar gaungnya besar, sama dulu kayak apa walaupun dulu saya pernah mungkin 4 kali 1000 orang Bu dari BKKBN juga waktu itu BNP2TKI juga pernah hampir 1000 orang saya kumpulin di Binjai ya Pak besar acaranya, juga dibuat salah satu juga acara seperti yang dibuat BKKBN dimana ada yang diundang, mungkin 100-200 orang dikasih uang, dikasih transportasi, kasih makan begitu, jadi ini mohon sekali lagi kalau seumpamanya kemarin cuman satu, kalau bisa sekarang, kalau dulu 1 per orang tetapi besar kegiatannya, dari BNP2TKI mohon kalau bisa sekarang 2 titik per Anggota dimana terserah Anggotanya dan waktunya begitu.

Dan saya kira dari anggaran seperti yang saya sebutkan tadi itu baru 50-60 saja yang Anggota, yang lainnya sudah tidak ini, sedikit ya, itu sosialisasi, ada sosialisasi yang lainnya, itu terserah badanlah mau melakukan atau gimana, kami tutup mata untuk itu. Itu saja Pimpinan sekedar tambahan, jadi untuk BNP2TKI 25 titik, kalau itu 50 juta per titik ya kalau yang lalu 150-200 itu kita dapat 7 titik, ada 5 titik juga, nah ini kalau bisa dirata-ratakan saja 1,5 per Anggota untuk sosialisasi itu karena kalau ini mungkin nanti bisa Bu kabupaten-kabupaten, nanti kalau sudah ada yang dapat tidak kita buat lagi, kita buat nanti di kabupaten yang belum dapat ya dan itu biasanya Bu saya contohkan disini kalau kita buat sosialisasi Bu, itu ada yang 2-3 jam ke lokasi, bisa Ibu bayangkan berapa transportasinya, berapa ini, sementara kalau kita buat di kota yang lain tahu *kita di cemooh* dan kalau kita tidak kasih uang makan mereka atau pun uang jajan, *halah apaan itu...*

KETUA RAPAT :

Maaf Pak bisa dipersingkat? Waktu kita terbatas.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Ya sebentar Bu.

Jadi, dari Pimpinan dan Anggota semuanya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan BKKBN 25 titik, nanti kalau bisa untuk BNP2TKI kalau bisa tadi yang sebelumnya 1 titik mohon diperbanyak menjadi 2 titik.

Terima kasih Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos., SH.,MM) :

Terima kasih Pimpinan.

**Yang saya hormati Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI,
Yang saya hormati Kepala BNP2TKI Pak Nusron beserta jajarannya.
Yang saya hormati Kepala BKKBN Ibu Diah ya dan jajarannya.**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Saya Imam Suroso A-172 PDI Perjuangan, Dapil Jawa Tengah III.

Yang pertama kali, Pak Nusron saya apresiasi walaupun anggarannya sedikit yang kurang lebih tidak setengah triliun tetapi semangatnya luar biasa, teman-teman pun saya minta diperjuangkan anggarannya, karena kaitannya dengan penempatan di luar negeri dan ternyata diluar negeri tenaga kerja kita banyak kasus, kasusnya tidak main-main hukuman mati, hukuman gantung dan seterusnya. Pak Nusron, saya juga apresiasi Pak Presiden Jokowi memerintahkan Pak Nusron untuk yang belum beruntung TKI kita di luar negeri dipulangkan, kemudian setelah pulang akan ditampung dan dididik kemudian dikasih pelajaran mungkin cinta tanah air, tidak usah ke negara lain yang sengsara, kemudian saya juga usulkan Pak Nusron, saya yakin nanti Pak Jokowi ada titik temu, ada jalan bagaimana mereka nanti langsung dipekerjakan apa itu tanam sawit lagi, Indonesia kan luar biasa tanahnya luas, di sawit itu luar biasa, Malaysia hanya separuhnya Pulau Jawa saja kok malahan orang kita disana, Indonesia luas sekali luar biasa, nanti Teman-teman juga akan memperjuangkan, menganggarkannya seperti itu, saya yakin nanti kalau ada solusi Pak Nusron sendiri kan mantan Anggota DPR RI nanti bisa, kami pun ada di Bamus mungkin nanti kalau ada Panja-panja yang kaitannya, ini kan ada 50 ribu tenaga kerja ini banyak sekali yang tidak jelas ini, betul Pak Nusron ya? Ini tanggung jawab *panjenengan*, makanya dimainkan. Itu yang pertama.

Yang kedua, advokasi Pak, jadi mohon untuk mengefisienkan kita itu tidak diperas oleh negara Arab dan sekitarnya advokasi sebelum vonis itu luar biasa, mohon maaf dulu saya dengan Pak Jumhur, Pak Agus dan teman-teman lainnya ini bermain di advokasi nyatanya efektif dan efisien, termasuk dua orang yang mau di hukum mati ini termasuk *panjenengan* sudah bermain dan *alhamdulillah clear* tidak usah pakai nyogok, sudah dihukum 5 tahun tetapi keluar, sekali lagi advokasi-advokasi dimainkan.

Kemudian, *panjenengan* harus tetap bekerja sama dengan Pak Hanif untuk Naker, ini saya sampaikan Pak Nusron tadi malam sudah rapat sampai jam 2 malam sama teman-teman bahwa Pak Jokowi itu kan sudah

sampai ke Malaysia ya kan? Sudah ada *agreement* dan seterusnya. Mumpung baik lah di Indonesia TKI yang bermasalah kan banyak, kemudian yang tidak berdokumen banyak, ini saya sarankan kerja sama untuk diputihkan, disana itu dikejar-kejar polisi, diarak dan sebagainya dilempar ke laut, karena dia ketakutan tidak punya dokumen, ah ini mbok ya diputihkan, ini biayanya murah dan jelas karena disana sendiri sudah janji Presiden Nakernya yang ada di Malaysia kalau suratnya lengkap oke, disini juga begitu lengkap oke, nah disana sudah tidak lengkap yang terjerumus itu diputihkan, sekali lagi diputihkan Pimpinan dan Teman-teman Komisi IX DPR RI tolong buat Panja kalau perlu untuk pemutihan di Malaysia khususnya dan dianggarkan, anggaran ini Pak nanti bisa kita perjuangkan juga siapa tahu ini bisa, kalau tidak mungkin APBN murni dan APBNP 2016 masih bisa, karena ini ke depan masih 5 tahun ini Pak Nusron bukan hanya ini saja, sama dengan BKKBN, BKKBN anggarannya Rp.3,2 triliun dibanding BNP setengah triliun tidak ada tidak jelas ya kan? Tetapi tanggung jawab, lah ini Ibu tanggung jawabnya juga banyak nasional, ini kelahiran luar biasa Bu jebol, ya kan? Karena sosialisasinya kurang, tolong itu dicatat masih kurang, makanya seperti Pak Ansory bilang, seperti Bu Siti tadi bilang kita wajib sosialisasi turun ke bawah itulah yang sangat penting. Jadi, BKKBN ada nama, ada kerja, penyerapan Rp.3,2 triliun itu jelas DPR RI yang memperjuangkan jelas bekerja, di mata rakyat baik semua ini untuk kepentingan rakyat, itu laksanakan. Kalau Pak Nusron dan Ibu Diah maksimum kita kan gigih, bukan hanya Banggar yang maju menganggarkan Tahun 2016 murni itu, kita bersatu, bergabung Banggar, mata anggaran *panjenengan*, buatlah anggaran yang penting-penting, saya yakin cair. Saya berterima kasih ya Ibu sudah memanggil seperti tadi, kemudian Pak Nusron juga program-program kerakyatan sosialisasi biar tidak terjerumus itu dijalankan terus, jadi itu Pak Nusron sekali lagi advokasi kemudian, Bu Diah mudah-mudahan saja diangkat, anggarannya sudah ada ini tolong dimainkan yang maksimum, kita pun akan mengawas, memantau dan ikut didalamnya ke depannya pun anggaran kita bantu-bantu pula itu pasti.

Pimpinan, sementara dari saya cukup itu.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT :

Walaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Baik, sekarang saya berikan kesempatan kepada Pak Nusron untuk menanggapi dan nanti dilanjutkan oleh Ibu Ambar untuk menanggapi. Silakan.

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Baik, terima kasih.

Pak Ketut yang kami hormati, anggaran Diyat yang kami usulkan tadi yang akan dibahas dalam komponen realokasi pun ke KL di Kemenlu itu adalah jalan akhir, kami tahu Pak bahwa SOP kita, pola kita itu ada 4

(empat) Pak, yang pertama, alokasi melalui *lawyer* yang handal dan optimal untuk itu, kalau di Arab Saudi kita cari *lawyer* yang handal juga, kemudia yang kedua adalah jalur diplomasi Bapak Presiden sudah berkirim surat langsung kepada Raja Salman ketika sambil tajiah, diantar langsung sama Wakil Presiden soal hukuman mati ini, kemudian yang ketiga adalah intermediasi dengan tokoh-tokoh yang disegani, kita tahu di Indonesia ini ada beberapa tokoh dan itu juga sudah dimintai tolong, tokoh itu yang sangat dihormati oleh Pemerintah Saudi dan juga di kalangan masyarakat Arab Saudi, ada Faidah Nurwahid itu juga dihormati oleh Pemerintah Arab Saudi, ada Pak Maftuh Sauni itu juga dihormati oleh Pemerintah Arab Saudi, ada juga Ustad Ikhyah Ketua Haitul Sofa itu ini juga sangat dihormati di Arab Saudi. Nah, Beliau-beliau juga sudah kami datangi secara khusus untuk minta tolong kalau nanti ada apa-apa, tetapi Pak ini kita sifatnya jaga-jaga kalau sampai jalan akhir itu pada konteks hukuman mati nanti mentok tetap pada ujungnya adalah minta maaf, kalau ada pemberian maaf kepada korban, sebagaimana kami ketahui saya sampaikan ada salah satu keluarga korban di Arab Saudi membunuh juga di London dan Raja tidak mau mengeluarkan dana APBNnya untuk membayar Diyat kepada keluarga raja itu di London, karena apa? Keluarga korban tidak mau memaafkan, kita mengirim semua diplomasi ini disana mau lewat raja, mau lewat apa, hukum disana mungkin Pak Ansory lebih paham daripada saya, hukum di Arab Saudi raja itu tidak punya hak untuk intervensi kalau sampai Mahkamah, yang bisa kita lakukan kepada raja adalah meminta tolong raja mengirimkan kaki tangannya Beliau untuk merayu kepada keluarga korban untuk memaafkan dan ujung-ujungnya mohon maaf orang Arab ini ketika memaafkan itu harus ada Diyat, ujung-ujungnya itu, jadi kalau sudah sampai pada level Diyat ini adalah hasil perundingan dari jalur-jalur informal itu.

Mungkin nanti kita bisa diskusi diluar soal masalah ini, soal jalur-jalur informal dan advokasi-advokasi semacamnya, memang tidak mungkin menyelesaikan masalah Arab Saudi termasuk masalah hukum mati itu dengan satu jalur surat menyurat, diplomati dengan kaku ala Kemlu begitu mohon maaf, tidak mungkin bisa, apalagi ini orang Arab harus luwes, banyak canda, banyak ini dan sebagainya, itu malah jalur-jalur informal lebih banyak bisa menyentuh pada level itu.

Kemudian yang kedua, masalah perwakilan kita di luar negeri, Pak Djoni kami sedang mempersiapkan itu Pak Djoni dan kami sudah bicara dengan Kemenlu dan kami diminta untuk mempersiapkan SDM, kalau kita lihat fungsi perwakilan kan ada 3 (tiga) pertama, diplomasi, kedua adalah konsuler dan ketiga adalah teknis. Konsuler apalagi menyangkut hubungan Warga Negara Indonesia yang ada disana, diplomasi adalah setiap yang ada ji uji disitu, teknis makanya ada atase tenaga kerja, ada atase perhubungan, ada BIN, ada atase pertahanan dan sebagainya teknisnya disitu, kita baru punya satu model *bandmark* penanganan masalah ini yaitu di Taiwan, di Tawan itu ada atase atau perwakilan dari tenaga kerja, juga ada pelaksana teknis daripada BNP2TKI, karena yang menangani TKI ini kan dua lembaga, Kemenaker urusannya adalah kebijakan, BNP2TKI adalah operator atau pelaksana daripada kebijakan tersebut, nah apakah masalah di luar negeri ini cukup dengan kebijakan? Kalau memang masalah di luar negeri dalam konteks perlindungan cukup dengan

kebijakan membuat peraturan dan sebagainya, cukup dengan adanya atase tenaga kerja, nah ini butuh kajian, pandangan kami mengatakan dengan begitu banyak numpuk masalah memang tidak semua minimal Malaysia, Hongkong, Timur Tengah perlu selain ada atase tenaga kerja ada pelaksana teknis yang bersifat operasi perlindungan dari BNP2TKI, nah karena itu kalau Bapak-bapak mendukung semacam itu kami dengan senang hati, karena apa? Karena itu akan bisa mengurangi residu persoalan-persoalan yang muncul dan yang ada, tetapi sekali lagi yang berhak menentukan apakah pelaksana teknis itu boleh kirim ke luar negeri atau tidak adalah Menlu, karena itu kita harus juga berdiskusi dengan Ibu Menlu, Ibu Menlu sebenarnya sudah memberikan sinyal positif kepada kami karena melihat bahwa itu akan membantu fungsi kekonsolideran. Nah, karena itu kami sudah siapkan Pak tenaga-tenaga handal yang akan kerja sama untuk dilatih dulu bersama dengan Kemenlu, mungkin belum bisa tahun ini mereka menempatkan perwakilan itu, mungkin tahun depan baru mulai bisa ada hasilnya. Doakan saja Pak untuk itu.

Kemudian dari Pak Imam dan Pak Ansory, yang soal sosialisasi dan sebagainya kami perhatikan Pak, memang kita mempunyai *concern* yang sama terutama di Medan di Sumatera Utara kawasan Asahan yaitu berkaitan dengan *trafficking* atau TKI yang ilegal itu salah satu pintu masuknya adalah ada di Asahan Tanjung Balai, kami mempunyai pandangan bahwa yang namanya melawan illegal harus ada tiga prasyarat terutama harus ada *law enforcement*, ada undang-undang yang mengatur, yang kedua, harus ada *state* aparat kami harus kuat dan aparat kami harus tegas tetapi *law enforcement*, *state* aparat yang kuat tidak akan ada artinya apa-apa kalau tidak ada *public support*, nah model-model sosialisasi semacam ini dalam rangka menggerakkan *awareness* orang supaya ada *public support* karena lebih bagus kita tidak bergerak kalau masyarakat sadar, daripada kita bergerak masyarakat tidak bersadar, kan pada prinsipnya pemerintah ini tidak mau bermusuhan dengan rakyat kalau rakyatnya sadar. Nah, karena itu bagaimana kita ingin melakukan pola-pola penyadaran kepada masyarakat itu, kami support Pak untuk itu dan kami senang, dengan lembaga lain saja kami butuh, lembaga lain itu yang mungkin pengaruhnya tidak sekuat Anggota DPR RI, ini Anggota DPR RI jelas, konsituennya jelas, tim suksesnya jelas, kenapa tidak kita fungsikan untuk kerja-kerja sosial? Bagi saya tidak ada soal, cuman tinggal namanya jangan Anggota DPR RI tetapi tokoh masyarakat setempat, saya kira itu.

Kemudian, yang terakhir dari Pak Imam Suroso, Pak Imam, ini ada dua PR (Pekerjaan Rumah) yang Pak Imam juga perlu bicara sama Pak Jokowi juga dan Pak Jokowi sudah setuju, sudah kami laporkan juga ke Presiden PR (pekerjaan rumah) kita adalah Arab Saudi sama Timur Tengah, Timur Tengah kita ada 634 ribu *over stay*, sementara lagi pendataan berapa yang visanya umroh, berapa yang visanya haji, karena sebagian besar mereka yang kerja jadi TKI disana itu menggunakan visa umroh sama visa haji, sebagian besar adalah mohon maaf orang NTB, orang Madura, orang Banjar dan orang Bugis sebagian besar. Pemerintah Arab Saudi sudah kasih sinyal positif tahun ini akan diputihkan kecuali yang visanya haji dan visanya umroh tidak bisa diputihkan, yang haji sama yang umroh diputihkan sama yang ketiga yang *unfeed condition* yang sudah tua dan sakit mohon dipulangkan, yang masih sehat karena

Pemerintah Arab Saudi masih butuh tenaga kerja akan diputihkan dengan sistem baru, mereka sudah membuat undang-undang tetapi kalau undang-undang disana itu tidak seperti undang-undang di kita pakai DPR RI, sudah membuat keputusan Menteri sudah lebih dari undang-undang kalau disana karena sistemnya kerajaan, yang disebut dengan *mosanet law* yang disitu sudah memuat *item-item*, poin-poin *concern* Indonesia tentang tenaga kerja disana.

RUU dan sebagainya yang kira-kira kalau diterjemahkan dalam konteks Indonesia Teman-teman TKI nanti kita disana itu tidak lagi ditempatkan dan dipekerjakan pada masing-masing majikan tetapi ditampung dalam suatu perusahaan, kemudian di *outsourcing* jadi perusahaan itulah yang mendeliver kepada masing-masing rumah tangga, rumah tangga membayar kepada PT tersebut, PT itu ditunjuk oleh Menteri tenaga kerja sana, PT itu membayar kepada tenaga kerja kita tetapi PT itu kita awasi bersama, persetujuan bersama antara Pemerintah Arab Saudi dan Pemerintah Indonesia, kemudian pembayarannya juga pakai *cash less*, tidak lagi pakai tunai sehingga ada migrasi, ada kontrol yang ketat pada level itu, itu sudah ada kesepakatan, dengan Malaysia juga sama, Malaysia tahun ini mulai bulan April membuka opsi lagi karena opsi yang lama kemarin berhasil memutihkan 30.000 orang dari bulan Juli sampai tanggal 31 Desember berhasil memulangkan 47.000 orang dan berhasil melakukan pemutihan 31.000 orang di Malaysia. Nah, tahun ini karena masih banyak dibuka lagi mulai tanggal 1 April sampai 31 Desember 2013 pemutihan lagi dari Malaysia dengan *treatment* yang sama sebelumnya, mereka menunjuk yang mereka sebut dengan *one stop services* yaitu Sarikat Iman yang ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri sana karena imigrasi disana itu dibawah Kementerian Dalam Negeri, Sarikat itu PT Pak kalau disini, Sarikat Iman, tetapi yang menjadi *concern* teman-teman TKI kita dan kami masih keberatan adalahb kalau lewat langsung hanya membayar 400 ringgit kemudian itu dendanya tetapi kalau lewat PT atau Sarikat ini kena 820 ringgit, Pemerintah Indonesia sudah mengirimkan opsi, surat kepada KDN, minta ada opsi yaitu diperbolehkan langsung kepada imigrasi sana dengan konsekuensi terlalu panjang birokrasinya dan mengulang butuh waktu. Yang nomer dua adalah diperbolehkan lewat channel Sarikat Iman tadi itu dengna konsekuensi membayar ongkos tambahan sehingga itu sifatnya tidak wajib tetapi opsional.

Jadi, usulan Pak Imam Suroso sudah kita tampung dan insyAllah akan berjalan sehingga jalan pemulangan itu adalah jalan akhir bukan satu-satunya jalan bagi mereka yang benar-benar sakit dan benar-benar tidak mampu baru kita pulangkan, kalau kita Pemerintah dipilih memilih untuk memulangkan atau tidak memulangkan sebenarnya kita memilih tidak memulangkan kalau mereka tidak ada masalah, kenapa? Kami juga sadar kalau mereka pulang disini belum ada jaminan pasti tentang pekerjaan yang ada disini sehingga nanti akan menambah problem di Indonesia lagi, kira-kira itu Pak.

Terima kasih.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos., SH.,MM) :

Pimpinan, sedikit tentang ini.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-PDIP (H. IMAM SUROSO, S.Sos., SH.,MM) :

Jadi, amanahnya Pak Nusron kaitannya dengan Pak Jokowi kami siap amankan Pak, karena ini nyawa banyak, harga diri bangsa dan negara terutama yang belum berhasil disana. Tentang pemutihan di Arab Saudi ini kan masih moratorium, itu ide yang sangat cerdas menurut saya, kalau memang itu sudah karena disana kan hukumnya itu hukum jahiliyah Pak kebodohan masih digunakan ya penyiksaan, perkosaan masih, makanya kita moratorium, nah sampai 48 tahun ini belum ada *agreement* Indonesia dengan Arab Saudi, kemarin itu sudah ada benih-benih *agreement*, saya datang juga sama Menteri Tenaga Kerja di Borobudur, Menteri Arab Saudi sudah perjanjian, nah ini sudah kita simpan kasihkan, ya nanti kita kembalikan kita paripurnakan, kita tindaklanjuti yang isinya diantaranya menghormati Indonesia TKI itu, dikasih libur. Kemudian, dikasih haji lainnya tidak ada, nah ini maksud saya BNP biar ngerti, biar 86 pula, biar ikut mendukung ya kan. Itu program *panjenengan* pemutihan itu bagus nanti didukung dengan *agreement* yang jelas tadi jadinya bagus, nanti moratorium bisa kita buka kalau ini memang jelas tetapi yang penting pemutihan di Arab itu *clear* dulu sip, Malaysia *clear* saya setuju, inilah yang namanya Kepala BNP2TKI muda semangatnya luar biasa walaupun anggarannya sedikit tetapi Teman-teman mainkan.

Terima kasih Pimpinan, silakan lanjut Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Karena kesepakatan kita jam 12 maka saya minta persetujuan untuk diperpanjang setengah jam ya.

(RAPAT : SETUJU)

Terima kasih.

Selanjutnya Ibu Ambar Ayu silakan.

SESTAMA BKKBN :

Terima kasih Pimpinan.

Beberapa hal yang kami sampaikan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI, yang pertama, berkaitan dengan sosialisasi jadi mungkin saya tidak menjawab satu per satu tetapi kelihatannya semua usulannya adalah kepada sosialisasi dan mudah-mudahan hari ini kami sudah mengumpulkan TA dari seluruh Anggota Komisi supaya ada komunikasi yang lebih lancar sehingga nanti kemitraan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya di dalam DIPA Tahun 2015 Pak yang sudah ada itu untuk KEI kreatif itu sudah ada 710 paket yang memang dibagi kepada seluruh Anggota yang totalnya itu ada 35,5 miliar dan yang tadi

kami sampaikan itu adalah usulan tambahan, maksudnya supaya ada variasi kegiatan tidak hanya KEI kreatif tetapi juga penggarap genre tetapi ternyata tidak disetujui oleh Kementerian Keuangan yang 300 paket sebanyak 15 miliar, nah sesungguhnya kami memang membuat paket-paket itu 50 Pak sesungguhnya bisa digunakan sekaligus 3 paket, nah ini kalau digunakan sekaligus 4 sehingga nilainya 200 karena itu harus lelang jadi mungkin nanti prosesnya lebih sulit lagi makanya kami menyarankan tiga paket maksimal bisa dilaksanakan. Segala usulan baik dari Bu Siti maupun dari Bu Imah, maupun Pak Djoni dan juga Pak Ketut tadi tentunya untuk sosialisasi ini nanti kami coba kordinasikan dengan kawan-kawan kami di Provinsi karena dalam waktu dekat kami juga akan melakukan rapat kordinasi dengan Kepala Perwakilan Provinsi agar bisa mengakomodasi saran-saran yang antara lain tadi supaya bisa diselesaikan dengan waktu dari seluruh Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI ketika turun, jadi supaya nanti tidak terjadi miss komunikasi di dalam pelaksanaannya, ini akan kami tindaklanjuti dan mudah-mudahan nanti Tahun 2016 tentunya untuk sosialisasi ini lebih dapat kita tingkatkan bersama, tentunya ini membutuhkan dari Bapak dan Ibu sekalian, namun apabila nanti dalam kegiatan kami pun juga bisa menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tidak menutup kemungkinan kami juga bisa mengundang Anggota Komisi IX DPR RI bukan untuk kegiatannya paket-paket tetapi misalnya ada kegiatan besar, menghadirkan tokoh masyarakat, tokoh agama kemudian kami juga bisa menghadirkan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI sebagai narasumber atau apa pun nanti akan kami bisa bicarakan secara internal di BKKBN.

Kemudian, hal-hal yang berkaitan dengan tindak lanjut petugas lapangan KB, sesuai dengan surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 sesuai dengan saran dan rekomendasi dari RDP yang lalu besok kami sudah mulai melakukan kordinasi dengan berbagai Kementerian, jadi sesuai dengan saran RDP yang lalu disarankan untuk bisa mendudukkan bersama dengan Menpan, dengan Kemendagri, kemudian juga dengan Bappenas karena yang mengatur berapa alokasi anggaran dan sebagainya adalah Bappenas dan Kementerian Keuangan, mudah-mudahan dari hasil itu nanti kita bisa melakukan langkah-langkah yang lebih konkrit lagi dan sesuai dengan saran yang pada waktu RDP yang lalu tentunya nanti akan kami tindaklanjuti dengan *workshop* bersama dengan beberapa pakar dan Anggota Komisi IX DPR RI, mudah-mudahan nanti di dalam upaya pengelolaan PLKB ini betul-betul jelas karena memang ada dua hal pengelolaan dan pendayagunaan di kabupaten kota sehingga kami memang sangat berhati-hati untuk melakukannya ini supaya nanti tidak terjadi ada kekosongan atau pun ada hal-hal atau pun ada pihak-pihak yang dirugikan dalam hal ini PLKB sehingga kami besok memang ingin mendiskusikan dengan beberapa Kementerian Lembaga yang terkait, mohon dukungannya sehingga nanti bisa berjalan dengan lancar di kemudian hari.

Kemudian, untuk usulan Ibu Siti tentunya koordinasi akan lebih kami tingkatkan karena kemitraan ini memang kunci utamanya adalah kordinasi, jadi segala masukkan dari Bapak dan Ibu sekalian tentunya akan kami perhatikan dan kami tindak lanjuti. Saya rasa itu yang bisa kami sampaikan, mengenai strategi mendapatkan anggaran tentunya nah ini

perlu belajar dari Komisi IX DPR RI bagaimana supaya Kementerian Keuangan bisa selalu meloloskan usulan-usulan kami, karena ternyata yang ada pun itu sesungguhnya belum memenuhi seluruh usulan kami, demikian Bu kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti senantiasa mendapatkan dukungan dari Komisi IX DPR RI.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih Ibu Ambar.

Bapak dan Ibu Anggota Komisi IX DPR RI yang saya hormati. Mitra kita dua Kepala Badan.

Kalau tidak ada lagi kita bisa masuk ke kesimpulan ya, bisa ditayangkan?

Baik, kita masuk ke kesimpulan.

Draft kesimpulan RDP Komisi IX DPR RI dengan Kepala BNP2TKI dan Plt Kepala BKKBN, Rabu tanggal 11 Februari 2015 :

1. Komisi IX DPR RI dapat memahami :
 - a. Alokasi anggaran BNP2TKI di dalam APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.393.280.870.000,- (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Tiga Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).
 - b. Alokasi anggaran BKKBN di dalam APBN Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.3.194.457.740.000,- (*Tiga Triliun Seratus Sembilan Puluh Empat Miliar Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
2. Komisi IX DPR RI akan mengkaji usulan program dan kegiatan prioritas dari BNP2TKI dalam RAPBNP Tahun 2015 yang akan diusulkan dalam Tahun Anggaran 2016 yang meliputi :
 - a. Pemenuhan kekurangan sasaran pelayanan TKI sebesar Rp.70.700.000,- (*Tujuh Puluh Miliar Tujuh Ratus Juta Rupiah*)
 - b. Kemudian dukungan pemulangan WNI *over stay* dan TKI bermaslah sebesar Rp.225.000.000,- (*Dua Ratus Dua Puluh Lima Miliar Rupiah*).
 - c. Dukungan APBN untuk meringankan beban TKI Informal sebesar Rp.1.500.000.000,- atau Rp.1.020.000.000,- (*Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah*) atau (*Satu Triliun Dua Puluh Miliar Rupiah*).
3. Komisi IX DPR RI akan mengkaji usulan program dan kegiatan prioritas BKKBN dalam RAPBNP Tahun Anggaran 2015 yang akan diusulkan dalam Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.202.726.200.000,- (*Dua Ratus Dua Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan terkait BKKBN sebesar Rp.6.882.000.000,- (*Enam Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Rupiah*).

- b. Pembinaan kependudukan KB dan pembangunan keluarga KKBPB bagi mitra kerja yang setiap tingkatan wilayah sebesar Rp.70.900.350.000,- (*Tujuh Puluh Miliar Sembilan Ratus Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).
 - c. Pembinaan mekanisme pelayanan dasar masyarakat sebesar Rp.58.713.900.000,- (*Lima Puluh Delapan Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah*).
 - d. Kegiatan genre ceria melalui seni budaya sebesar Rp.15.000.000.000,-
4. Komisi IX DPR RI meminta kepada BNP2TKI dan Plt Kepala BKKBN untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran melalui penajaman program kegiatan dengan memperhatikan aspirasi daerah sebagai bentuk pelaksanaan representasi Anggota DPR RI.

Dari Pak Nusron mungkin atau dari Ibu Ambar yang akan di ini?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Saya sedikit Pimpinan.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Dari Plt Bu Sestama, tadi kan Satker kegiatan 50 ya? Bisa tidak dibuat per kegiatan 150 seperti yang sebelumnya tapi 10 kegiatan begitu, dari anggaran kita kan pasti bisa menyisir anggaran yang ada, dari anggaran yang 3 triliun tadi itu kan bisa disisip ke anggaran sosialisasi itu menjadi 75 miliar, jadi sebagaimana 2 tahun berturut-turut kalau tidak salah itu, itu paling tidak walaupun tidak ditambah tetapi paling tidak per kegiatannya itu ditambah jumlah, jadi tadi kan 50 kata Ibu ya? Dia ditambah menjadi 150, jadi tidak perlu lagi 3 kegiatan digabung, langsung 1 kegiatan itu buat kegiatan langsung per Anggota dapat 10, kan bisa diininya, mohon jawabannya dulu.

Terima kasih Pimpinan.

SESTAMA BKKBN :

Baik Pak.

Mohon ijin Ibu Pimpinan.

Jadi, yang lalu pun sebenarnya paketnya 50 Pak tetapi dalam pelaksanaannya memang 1 kali kegiatan, digabung. Jadi, yang dari tahun-tahun sebelumnya kami tidak pernah memaket, satu paket itu 150 tetapi 2 tahun kemarin itu pelaksanaannya memang digabung, jadi diperbolehkan untuk digabung sekaligus begitu Pak.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Ya baiklah.

Kalau bisa disisip dari anggaran lain ditambah ke sosialisasi.

SESTAMA BKKBN :

Kami kaji terlebih dahulu Pak dan kami konsultasikan dengan Kementerian Keuangannya Pak, karena setiap output itu sudah terikat jadi nanti konsultasikan terlebih dahulu.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Kalau bisa nanti begini, bisa juga tim dari kita atau mungkin juga nanti kita berkordinasi dengan Komisi XI DPR RI untuk menemui daripada Dirjen Kemenkeu untuk ini begitu.

SESTAMA BKKBN :

Baik, kami tindak lanjuti.

KETUA RAPAT :

Baik, untuk kesimpulan?

SESTAMA BKKBN :

Saya boleh sedikit koreksi Bu mengenai total anggaran BKKBN bukan 3.129 tetapi 3.294.200.

Terima kasih Bu.

KETUA RAPAT :

Oke, salah kutip.

Baik, dari ...

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Ibu mohon maaf, yang terakhir Bu poin 2 yang terakhir.

Ini kami mengingatkan ya Bu mohon maaf Bu, ini tempatnya tidak di kami Bu, tempatnya di tempatnya Pak Hanif di Binalantas, ini saya titip saja sifatnya ini, mengapa begitu? Ini Pak Imam Suroso sama Pak Saiful Bachri kan kasih amanat sama kami untuk mengubah, mengupgrade wajah TKI kita ke depan supaya tidak wajah pembantu dalam rangka untuk meningkatkan martabat bangsa kita supaya tidak dikenal sebagai bangsa yang pengekspor pembantu atau pengekspor "babu", ini kan tidak bisa berhenti kalau tidak ada perubahan peraturan dan dukungan dana, perubahan peraturan sudah dari Pak Menteri membuat peraturan *one person one servant job* itu, kalau dia nyuci ya nyuci saja jadinya berarti sudah *professional housepality*, tetapi kurikulum BLKnya ke arah sana kan belum disiapkan, pelaksanaan ke arah sana kan belum disiapkan, nah

kami minta ini untuk dialokasikan untuk ke arah sana supaya dalam waktu dekat wajah TKI kita itu bukan wajah “babu”, bukan wajah pembantu tetapi wajah *professional housepitality* supaya seperti karyawannya Pak Imam Suroso di restoran di Pati sana itu.

KETUA RAPAT :

Jadi, bagaimana apa kita bikin...

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Yang butir c kesimpulannya mohon, saya setuju prinsipnya tetapi jangan ditempat saya, nanti jangan sampai ada kesan saya minta duit Rp.1,5 triliun ditempat saya kaget nanti.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Begini Ketua, interupsi Ketua.

KETUA RAPAT :

Ya silakan.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Saya kira kita juga harus mulai berani menyatakan bahwa ini memang kerjaan saya dan saya bertanggung jawab, jadi saya pikir tidak ada masalah itu Pak Nusron.

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Bukan begitu, saya tanggung jawab Bu. Cuman masalahnya di dalam Perpresnya kami tidak ada, nomenklaturnya tidak ada.

F-NASDEM (IRMA SURYANI CHANIAGO) :

Jadi, nanti negosiasinya bagaimana kalau itu ditempatkan di Nakertrans? Dititip?

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Begini, kita sudah rapat, bukan titip, kita sudah rapat juga dengan Teman-teman Binalantas sifatnya kami ini mengingatkan, meminta tolong dan meminta ya mohon dukungan kepada Teman-teman Komisi IX DPR RI untuk mengingatkan agar ini jangan sampai lupa kepada Binaker di Binalantas itu karena dananya ada, di alokasi itu pun sudah disiapkan, dialokasi pun sudah ada, jadi nanti akan datang ke Ibu lagi, jadi sifatnya tidak usah masuk kesimpulan tidak apa-apa jadi *note* saja, Bapak/Ibu sekalian jangan sampai lupa tolong nanti diingatkan, karena tanpa dengan

ini tidak ada revolusi di dalam model dan mekanisme penempatan TKI, sekaligus revolusi mental itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT :

Berarti ini kita *delete* tetapi menjadi catatan bagi Komisi IX DPR RI untuk dibicarakan dengan Kementerian Tenaga Kerja.

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Pimpinan, saya kira tidak usah di *delete* karena ini terobosan baru dan memang kita harus membuat terobosan-terobosan begitu ya, cuman bahasanya yang agak, ya ini tetap ada tetapi dengan berkoordinasi kepada Kementerian Tenaga Kerja tidak apa-apa, diterakhirnya begitu, jadi tidak usah ada catatan.

KETUA RAPAT :

Disambung saja?

F-PKS (H. ANSORY SIREGAR, Lc) :

Langsung butir c nya saja, disambung di ujungnya itu.

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Begini saja Bu, *dalam rangka untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja atau calon tenaga kerja Indonesia ya kan, peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI sepakat untuk adanya dukungan APBN untuk meringankan beban TKI sebesar itu yang akan dialokasikan di Kementerian Tenaga Kerja cq Dirjen Bina Lantas*, begitu saja, kalau kayak begini singkat ini.

F-PDIP (Ir. KETUT SUSTIAWAN) :

Pimpinan, poin ini boleh tetap ada hanya mungkin poinnya beda jadi jangan di 2c, bikin poin baru saja.

KETUA RAPAT :

Ya kita setuju.

Jadi, kita jadikan poin ini menjadi poin 3 ya.

Baik, saya baca ulang ya untuk poin 3.

Dalam rangka peningkatan kualitas calon tenaga kerja Indonesia Komisi IX DPR RI dan BNP2TKI sepakat adanya dukungan APBN untuk meringankan beban TKI Informal sebesar Rp.1.500.000.000 (Satu Triliun Lima Ratus Miliar Rupiah), ini dua-duanya mau kita masukkan? Mending 1,5 saja ya jadi yang dibawahnya kita delete, yang akan dialokasikan pada Kementerian Tenaga Kerja cq Dirjen Bina Lantas. Cocok?

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Saya kira itu Bu, *untuk meringankan beban* dihapus saja, jadi kita satu fokus saja *peningkatan kualitas* saja, ya betul *kualitas dan kesejahteraan* saja setuju.

KETUA RAPAT :

Kata-kata *calonnya* masih?

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Calon dihapus saja.

KETUA RAPAT :

Dihapus ya, karena ditingkatkan itu nanti tenaga kerjanya.

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

Ini koma ya Bu, 1,5 koma *untuk balai latihan kerja luar negeri yang akan dialokasikan pada* (tidak jelas) supaya nanti fokusnya gunanya jelas.
Oke Bu, terima kasih.

KETUA RAPAT :

Cocok?

Ada lagi?

Kalau tidak dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kita bisa terima ya ini.

(RAPAT : SETUJU)

Baik, terakhir kepada Pak Nusron nanti bergantian dengan Ibu Ambar untuk menyampaikan kata penutupnya, silakan.

KEPALA BNP2TKI (NUSRON WAHID) :

**Ibu Pimpinan dan Bapak Pimpinan yang kami hormati,
Bapak dan Ibu yang mulia serta Anggota DPR RI Komisi IX.**

Saya mohon maaf sama Habib Mahir, berkali-kali saya menyebut orang Arab Pak mohon maaf ini, ini tetangga saya ini sohib kami, mohon maaf Pak bukan bermaksud untuk diskriminatif tetapi memang fakta kondisi sosial, kulturalnya begitu. Saya mengucapkan terima kasih sekali atas dukungannya dan mohon kerja sama ini bisa dilanjutkan tidak hanya di rapat tetapi juga di lapangan.

Sekian.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

SESTAMA BKKBN :

Yang kami muliakan Pimpinan dan Anggota Komisi IX DPR RI.

Kami jajaran BKKBN mengucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian untuk mendukung program pengendalian penduduk keluarga berencana dan pembangunan keluarga, mudah-mudahan ke depan kami bisa lebih meningkatkan sosialisasi dalam rangka mengkampanyekan program KKBPK di masyarakat.

Terima kasih atas perhatian.

KETUA RAPAT :

Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala BNP2TKI Pak Nusron, yang sudah menyampaikan presentasinya, kepada Plt BKKBN Ibu Ambar Rahayu dan seluruh Anggota DPR RI Komisi IX, *alhamdulillah* kita sudah menyelesaikan Rapat Dengar Pendapat ini, dengan mengucapkan *alhamdulillahirabbil alamin* Rapat Dengar Pendapat ini kita tutup.

*Wallahul Muwafiq Ila Aqwamith Thariq
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.25 WIB)

**Jakarta, 11 Februari 2015
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,**

ttd.

**MUHAMMAD YUS IQBAL, SE
NIP. 196707171993031006**